



► EFISIENSI ANGGARAN

Pemkab Bantul Fokuskan Empat Sektor Prioritas

BANTUL—Pemkab Bantul terus memantapkan pembahasan efisiensi anggaran sesuai arahan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Langkah ini mengarahkan pemangkasan anggaran di sejumlah sektor untuk dialihkan ke bidang prioritas seperti pendidikan, ketahanan pangan, pengendalian inflasi, dan infrastruktur.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bantul, Trisna Manurung menyebut efisiensi anggaran ini didasarkan pada regulasi tersebut termasuk di dalamnya anggaran hibah dan bantuan sosial (bansos) juga ikut

dibatasi.

"Beberapa item yang disebut dalam Inpres maupun SE Mendagri, seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial, serta kajian-kajian yang hanya bersifat pendukung, mengalami pembatasan," ujarnya, pekan lalu.

Selain itu, sebagai tindak lanjut kebijakan ini, Pemkab Bantul saat ini tengah menyiapkan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD 2025. "Minggu depan kami mulai mempersiapkan, melakukan *entry data* serta menyosialisasikan kepada perangkat daerah terkait," ucap Trisna.

Meski belum ada angka pasti terkait

dengan jumlah efisiensi anggaran yang dilakukan, dia memastikan bahwa dana yang dikurangi akan dialokasikan ke sektor prioritas. "Sumber pendanaan yang dihilangkan atau dikurangi berasal dari DAU [Dana Alokasi Umum] spesifik yang sebelumnya langsung turun dari pusat, serta Silpa [Sisa Lebih Penggunaan Anggaran] APBD Definitif 2024 yang telah mengalami penyesuaian pasca pemeriksaan BPK," jelasnya.

Di sisi lain, Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan (Dishub) Bantul, Toto Pamudji Rahardjo memastikan layanan bus sekolah gratis tidak terdampak efisiensi ini. "Layanan publik seperti

bus sekolah tetap berjalan sepanjang 2025, meskipun hanya dengan dua armada yang tersedia," katanya.

Rute bus sekolah yang melayani Kapanewon Bantul, Pandak, Pajangan, dan Sedayu tetap beroperasi tanpa kendala. "Jam penjemputan sudah disesuaikan dengan waktu masuk sekolah, sehingga tidak ada keluhan terlambat," ujar dia.

Saat ini, Dishub Bantul memiliki tiga bus sekolah, tetapi hanya satu yang siap operasional. "Untuk pengadaan bus baru lewat APBD 2025 tidak memungkinkan. Kami membutuhkan bantuan atau hibah bus dari Pusat," kata dia. (Yosef Leon)

